

**IMPLIKASI HUKUM HAK KEPERDATAAN TERHADAP SERTIFIKAT
TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN GAMBUT
(STUDI KASUS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

**Oleh
Carlos Yeremia Andrew
NIM.190574201030**

ABSTRAK

Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektar. Namun tidak jarang lahan gambut menjadi salah satu permasalahan dimana penetapan lahan gambut yang ditetapkan kepada tanah masyarakat yang bersertifikat berakibat kepada Hak keperdataan masyarakat. Penetapan kabupaten kepulauan meranti sebagai salah satu daerah yang terdampak terhadap dikeluarkannya Sebagai Lahan Gambut Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/ 2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Sehingga berimplikasi terhadap hak keperdataan dikalangan masyarakat, oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut di kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dimana dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang undangan. Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah ada upaya yang dapat ditempuh dalam melindungi kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu dengan usaha preventif dan represif, sehingga lahan yang ditetapkan sebagai area PIPPIB bisa dijadikan atau dapat dikelola kembali dan unsur unsur hukum dalam hak keperdataan untuk proses peralihan hak dapat terlaksana.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Lahan Gambut, Sertifikat Tanah.

***The Implication Of Civil Rights Law Against Land Certificates Designated As Peatlands
(Case Study Meranti Archipelago Regency)***

**By
Carlos Yeremia Andrew
NIM.190574201030**

ABSTRACT

Indonesia has biggest tropical peat area with an area reach of 13.43 million hectares. However not uncommon peatland is one of the problems where the designation of peatland that is assigned to community land that is certified results in community civil rights. Determination of the Meranti Archipelago Regency as one of the areas affected by its issuance as Peatland Based on the Statement of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Concerning the Determination of National Peat Ecosystem Function Map. So that it has implications for civil rights among the community, therefore based on this problem it needs to be studied more deeply. The purpose of this research is to find out the legal implications of civil rights to land certificates designated as peat land in the Meranti Islands district and to find out the form of legal protection for civil rights over land certificates designated as peat land. This research uses the Normative Empirical research method where by finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced by the statutory approach. Therefore, in solving the problem, there are efforts that can be taken to protect legal certainty and legal protection, namely preventive and repressive efforts, so that the land designated as the PIPPIB area can be used or can be re-managed and the legal elements in civil rights for the process of transferring rights can be done.

keywords : The law implication, Peatland, Land sertificate